



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI Selasa, 30 Januari 2024



## RINGKASAN BERITA HARI INI



**FINISHING:** Pekerja menyelesaikan pembangunan SMPN 2 Tulangan kemarin. Proyek tersebut mestinya selesai akhir tahun lalu.

### Sama-Sama Masuk Tahap Finishing

**Pembangunan Lanjutan SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon**

**SIDOARJO** - Pembangunan lanjutan SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon sampai saat ini belum selesai meski sudah ada penambahan waktu. Mestinya, keduanya tuntas pada akhir tahun lalu. Saat ini kedua proyek masuk tahap finishing.

Pun, bangunan sekolah sudah tampak berdiri kokoh. "Seluruh struktur bangunan sudah tuntas, tinggal pengecatan sedikit," katanya. Pemasangan genting, atap, pintu, dan jendela juga sudah dilakukan.

Heri menyatakan, proyeknya pembangunan SMPN 2 Tulangan itu tuntas dalam dua sampai tiga hari ke depan. "Tepat akhir Januari ini proyeknya sudah tuntas," katanya. Selain menuntaskan sedikit pengecatan, saat ini para pekerja merapikan sisa material bangunan yang masih berada di lokasi. Juga pengecekan akhir sebelum nanti diserahkan ke dinas dikbud.

Tak jauh beda dengan SMPN 2 Tulangan, pembangunan SMPN 2 Prambon juga hampir tuntas. Namun, proyeknya belum tuntas di akhir Januari ini. "Kekurangannya sedikit lebih banyak dibandingkan yang di SMPN 2 Tulangan," kata Heri. "Penuntasan pengecatan sama merapikan-merapikan saja. Namun, secara konstruksi sudah selesai semuanya," katanya. Proyeknya, awal Februari nanti sekolah itu tuntas terbangun.

Heri menyatakan, proyek tersebut mengalami keterlambatan dari target. Seharusnya tuntas akhir tahun lalu. Alhasil, pelaksana dikenai sanksi denda. "Pelaksana diberi waktu untuk menyelesaikan maksimal 50 hari dari target," katanya. Artinya, pertengahan Februari nanti maksimal harus tuntas. (uzi/c6/any)



TERHARU: Calon jamaah haji yang berangkat tahun lalu.

### 90 Persen Jamaah Haji Selesaikan Pengurusan Paspor

**KOTA** - Menjelang musim haji tahun 2024, 90 persen Calon Jamaah Haji (CJH) Sidoarjo sudah menyelesaikan pengurusan paspor. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (P-JU) Kemenag Sidoarjo Khoidar menyampaikan,

kuota jamaah haji 2024 mencapai 213.320 jamaah. Sidoarjo mendapatkan porsi sebanyak 2.526 jamaah. Pembagian kuota tersebut terdiri dari 2.478 jamaah haji reguler, 48 jamaah haji lansia, dan 832 jamaah haji

cadangan. Kuota tambahan dari JCH cadangan ini, kata dia, juga sudah diminta untuk membuat paspor. Kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap satu dan dua serta

Ke Halaman 10

### Pasca OTT KPK, Pelayanan Perpajakan di BPPD Sidoarjo Berjalan Normal

**Sidoarjo, Bhirawa**

Pasca operasi tangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), yang menjerat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, AS dan anak buahnya SK, pelayanan di BPPD Sidoarjo pada, Senin (29/1), berjalan dengan normal.

Pada pagi harinya, Pj Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto, bersama dengan Asisten I Ainur Rahman, Asisten III dr Atok Irawan dan Kepala BKD M. Mahmud, da-

tang saat apel pagi dan memberi semangat kepada pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Andjar menjadi pemimpin apel pagi di BPPD Sidoarjo itu. Pegawai mendapat pesan, pelayanan di OPD tersebut jangan sampai terhenti. "Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terhenti. Itu akan lebih parah," ujar Mahmud, usai memantau perkembangan pelayanan di BPPD Sidoarjo.

ke halaman 11

### Pulang Salawatan, Lima Bocah Diduga Hendak Sikat HP Sopir Truk

**Orang Tua Dipanggil ke Polsek Krian**

**SIDOARJO** - Lima bocah asal Surabaya diamankan aparat Polsek Krian kemarin (29/1) pagi. Lima anak di bawah umur dengan inisial MKA, 15, 15, 15, 14, AP, 14 dan MNA, 11, itu langsung dibawa ke Mapolsek Krian. Lima bocah itu diamankan karena diduga mau mencuri HP milik seorang sopir truk di salah satu warkop daerah

Jalan Bypass Krian. "Benar ada beberapa anak di bawah umur yang diamankan pihak kami," ujar Kapolsek Krian Kompol Diky Dzul saat dikonfirmasi. Diky mengatakan bahwa sekitar pukul 05.00, penjaga warkop melihat satu di antara lima bocah tersebut sempat mengambil rokok sopir truk yang sedang istirahat. Setelah mengambil rokok, diduga salah seorang bocah itu hendak mengambil HP milik sopir yang sedang di-charge. "Baru

dipegang dan belum sempat diambil ketahuan pemilik warkop juga sopir," tuturnya. Diky mengungkapkan bahwa kelima bocah akan dikembalikan kepada keluarganya. Pihaknya juga memanggil Dinas Pemberdayaan Perumahan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana (DPAPKKB) Surabaya. "Kami panggil semua orang tua dan dinas terkait untuk jadi pelajaran bagi anak-anak ini," imbuhnya. Ayah MNA,

yaitu Sugianto, 43, mengatakan bahwa anaknya sudah sering pergi lama. MN berpacaran pada Sabtu (27/1) lalu. "Saya tidak tahu kalau dia diajak untuk ikut salawatan dengan cara nebug truk atau pikap ke Blitar," tuturnya. Sementara itu, ibu MKA, yaitu Rohiyah Ulla, 40, mengatakan bahwa anaknya saat itu berpamitan hendak membeli roti bakar. Rohiyah tidak tahu bahwa anaknya ternyata menuju ke Blitar bersama teman-

temannya untuk menghadiri salawatan. "Saya memang tahu di HP anak saya ada grup salawatan dan saya pikir anak saya tidak akan seliahi ini ke luar kota tanpa bekal," ungkapnya. Diketahui untuk makan sejak Sabtu hingga Senin mereka hanya bisa meminjam di warung-warung sepanjang wilayah Sidoarjo-Blitar. "Ini jadi pelajaran bagi kami orang tua untuk terus mengawasi anak-anak kami," ujar ibu MKA itu. (eaz/c6/any)

### Program UHC Bagi Masyarakat

## Pemkab Cover BPJS Kesehatan 153.229 Ribu Jiwa

**SIDOARJO** - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali mengaktifkan program Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 ini. Pemkab Sidoarjo akan mencover BPJS Kesehatan gratis kepada 153.229 ribu jiwa warga Sidoarjo. Awal Januari ini jaminan kesehatan itu mulai dapat dimanfaatkan oleh warga Sidoarjo.

Pagi tadi, Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Sidoarjo di launching di Pendopo Delta Wibawa, Senin (29/1/24). Asdep Bidang Keperawatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Wilayah VII BPJS Kesehatan Jatim Aryo Pambudi didampingi Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita serta Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman hadir dalam kesempatan itu. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo M. Ainur Rahman mewakili Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP dalam sambutan menyalaungkan UHC mengatakan diaktifkannya kembali UHC menjadi bukti komitmen Pemkab Sidoarjo terhadap perlindungan kesehatan masyarakat Sidoarjo. Disampatkannya kebjakan itu menjadi salah satu dari 17



Pemkab Sidoarjo launching Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Senin, (29/1/24)

program prioritas bupati dan wakil bupati Sidoarjo. "Ini merupakan bentuk komitmen yang kuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bagaimana program UHC ini sebuah bentuk kebijakan untuk melindungi kesehatan seluruh warga Sidoarjo," ucapnya. M. Ainur juga mengatakan di-launchingnya kembali UHC menjadi bentuk komitmen Pemkab Sido-

arjo dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada warga Sidoarjo. Oleh karenanya diharapkan kebijakan UHC tersebut akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. "Dengan UHC ini diharapkan tingkat pelayanan kesehatan dan tingkat kesehatan masyarakat Sidoarjo semakin tinggi," ujarnya. M. Ainur juga mengatakan kes-

ehatan menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kesehatan juga menjadi tolak ukur Indeks Pembangunan Manusia sebuah wilayah. Oleh karenanya peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat harus terus dijaga.

"Pasca launching ini bukan berarti akhir dari segalanya, namun ini awal dari proses panjang kita bagaimana menjaga komitmen dan meningkatkan layanan kesehatan yang harus kita berikan kepada masyarakat," ujarnya. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita mengatakan 153.229 ribu jiwa warga Sidoarjo yang tercover BPJS Kesehatan gratis itu masuk dalam segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBBPU) dan bukan pekerja pemerintah daerah. Mereka mendapatkan hak rawat kelas tiga di rumah sakit yang menerima pasien BPJS Kesehatan. Terdapat 25 rumah sakit di Sidoarjo yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada semester satu tahun 2023 sejumlah 1.982.938 jiwa dengan peserta aktifnya sebanyak 1.500.935 jiwa sehingga

jumlah persentase peserta aktif pada saat ini adalah 75,69 persen," ungkapnya. Sementara itu Asdep Bidang Keperawatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Wilayah VII BPJS Kesehatan Jatim Aryo Pambudi mengapresiasi capaian UHC yang dilakukan Pemkab Sidoarjo. Dikatakannya cakupan 75 persen peserta aktif BPJS Kesehatan warga Sidoarjo menjadikan Kabupaten Sidoarjo berstatus UHC privilege non cut off.

"Yang dimaksud non cut off itu masyarakat yang memiliki KTP Sidoarjo dapat mendaftar melalui mekanisme yang dilakukan Dinas Sosial dan kepesertaannya bisa langsung aktif tanpa harus melewati masa tunggu," ucapnya. "Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak bupati beserta bapak wakil bupati, ketua DPRD, kepala OPD, camat, kepala desa dan seluruh pihak yang sudah berkomitmen bekerja keras sehingga Kabupaten Sidoarjo mencapai UHC," ucapnya. • Loe



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Pulang Salawatan, Lima Bocah Diduga Hendak Sikat HP Sopir Truk

### Orang Tua Dipanggil ke Polsek Krian

**SIDOARJO** - Lima bocah asal Surabaya diamankan aparat Polsek Krian kemarin (29/1) pagi. Lima anak di bawah umur dengan inisial MKA, 15; RS, 15; AFS, 14; APF, 14; dan MNA, 11; itu langsung dibawa ke Mapolsek Krian.

Lima bocah itu diamankan karena diduga mau mencuri HP milik seorang sopir truk di salah satu warkop daerah

Jalan Bypass Krian. "Benar ada beberapa anak di bawah umur yang diamankan pihak kami," ujar Kapolsek Krian Kompol Daky Dzul saat dikonfirmasi.

Daky mengatakan bahwa sekitar pukul 05.00, penjaga warkop melihat satu di antara lima bocah tersebut sempat mengambil rokok sopir truk yang sedang istirahat. Setelah mengambil rokok, diduga salah seorang bocah itu hendak mengambil HP milik sopir yang sedang di-charge. "Baru

dipegang dan belum sempat diambil ketahuan pemilik warkop juga sopir," tuturnya.

Daky mengungkapkan bahwa kelima bocah akan dikembalikan kepada keluarganya. Pihaknya juga memanggil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya.

"Kami panggil semua orang tua dan dinas terkait untuk jadi pelajaran bagi anak-anak ini," imbuhnya. Ayah MNA,

yaitu Sugianto, 43, mengatakan bahwa anaknya sudah sering pergi lama. MN berpamitan pada Sabtu (27/1) lalu.

"Saya tidak tahu kalau dia diajak untuk ikut salawatan dengan cara *nebeng* truk atau pikap ke Blitar," tuturnya. Sementara itu, ibu MKA, yaitu Rohdiyah Ulfa, 40, mengatakan bahwa anaknya saat itu berpamitan hendak membeli roti bakar.

Rohdiyah tidak tahu bahwa anaknya ternyata menuju ke Blitar bersama teman-

temannya untuk menghadiri salawatan. "Saya memang tahu di HP anak saya ada grup salawatan dan saya pikir anak saya tidak akan sejauh ini ke luar kota tanpa bekal," ungkapnya.

Diketahui untuk makan sejak Sabtu hingga Senin mereka hanya bisa meminta di warung-warung sepanjang wilayah Sidoarjo-Blitar. "Ini jadi pelajaran bagi kami orang tua untuk terus mengawasi anak-anak kami," ujar ibu MKA itu. (eza/c6/any)

## Jawa Pos



AHMAD REZA/JAWA POS

**TAK BERJEJAK:** Berdasar peta Belanda, sebelumnya wilayah permukiman Tawang Sari Gang 1, Taman, diketahui merupakan Pabrik Gula Tawang Sari sekaligus bekas pabrik koin.

## Dulu, Ada Pabrik Gula dan Pabrik Koin di Tawang Sari

**SIDOARJO** – Selain Pabrik Gula (PG) Ketegan, rupanya di Taman masih ada satu lagi pabrik gula yang cukup besar pada masa kolonial Belanda.

Menurut pegiat sejarah Sidoarjo Masa Kuno dr Sudi Harjanto, pabrik gula lainnya di Taman berada di Tawang Sari. "Adanya PG Tawang Sari ini tampak di peta Belanda 1892 dan 1922," katanya.

Meski begitu, sisa-sisa bangunan PG Tawang Sari kini sudah tidak ada lagi. Bangunan pabrik diduga sudah berganti menjadi permukiman. "Hanya, memang sekeliling titik sesuai peta Belanda itu banyak bangunan lawas," tuturnya.

Menurut berkas dokumen Belanda diketahui sebelum menjadi tempat pembuatan gula pada 1870-an, pabrik tersebut digunakan untuk pembuatan koin. "Itu pindahan dari pabrik koin dari Surabaya," jelasnya.

Seiring waktu karena permukaan air Sungai Krembangan di dekat pabrik sering meluap, pabrik koin berganti menjadi pabrik gula.

"Hingga kini belum diketahui pasti kapan PG Tawang Sari ini berakhir masa operasionalnya," tuturnya. (eza/c6/any)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## BPJS Kesehatan dan Pemkab Resmikan UHC Non-Cut Off

**SIDOARJO** – Program *universal health coverage* (UHC) *non-cut off* kemarin (29/1) diresmikan oleh Pemkab Sidoarjo dan BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo. Kendati baru diresmikan, UHC sebenarnya sudah bisa dirasakan oleh warga Kota Delta sejak awal Januari.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita mengatakan bahwa kini kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Sidoarjo sudah mencapai 1.500.935 jiwa. "Atau jika dalam persentase, sudah 76 persen per hari ini," tuturnya.

Sehingga program UHC *non-cut off* itu sudah bisa dijalankan. "Karena minimal untuk bisa jadi UHC *non-cut off* ini, perlu 75 persen kepesertaan aktif," jelasnya. Sementara itu, untuk cakupan kepesertaan JKN di Sidoarjo, baik aktif maupun nonaktif, sudah mencapai 100

Yessy mengatakan, dengan berjalannya UHC *non-cut off* itu, penanganan di pelayanan kesehatan bagi warga Sidoarjo bisa cepat dilakukan. "Masa tungguanya tidak lama lagi, tidak sampai 14 hari seperti dulu," ujarnya.

Warga yang BPJS-nya nonaktif bisa berobat di FKTP seluruh Sidoarjo dan kepesertaannya langsung aktif. "Ini khusus bagi warga Sidoarjo yang pernah didaftarkan pemkab sebelumnya," tuturnya.

Menurut Yessy, UHC *non-cut off* itu berlaku di seluruh puskesmas wilayah Kota Delta. Selain itu, FKTP seperti klinik dan dokter praktik yang bekerja sama dengan BPJS. "Begitu pun dengan 24 rumah sakit yang saat ini masih bekerja sama dengan BPJS," jelasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemkab Sidoarjo M.

persen lebih.

Untuk segmen PBI APBD, sudah terdaftar sebanyak 153.229 jiwa. Jumlah tersebut bertambah selepas Desember lalu pemkab melalui dinas sosial (dinsos) dan dinas kesehatan (dinkes) mendaftarkan 83.335 jiwa.

Ainur mengatakan bahwa diaktifkannya kembali UHC merupakan komitmen pemkab dalam melaksanakan program di bidang kesehatan. "Ini merupakan salah satu dari 17 program prioritas bupati dan wakil bupati," tuturnya. (eza/c6/any)

## Jawa Pos

# PENDIDIKAN

## Siapkan Kuota 2.000 Beasiswa

**SIDOARJO** - Pemkab Sidoarjo tahun ini kembali membuka pendaftaran beasiswa pendidikan. Total ada 2.000 kuota. Rencananya, 31 Januari mendatang pendaftaran mulai dibuka.

Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo Mochammad Hudori mengatakan, beasiswa dibagi tiga bidang. Yakni, dari bidang kesra sebanyak 500 kuota, Dinas Sosial Sidoarjo sebanyak 500 kuota, serta Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo sebanyak 1.000 kuota. Hudori mengatakan, pembagian tersebut disesuaikan kategori beasiswa.

Kuota yang dibuka Dinsos Sidoarjo untuk kategori pendaftar tidak mampu, kuota dari Disporapar Sidoarjo untuk kategori prestasi akademik dan nonakademik. Sedangkan pihaknya memfasilitasi

...mendukung. Sedangkan, pihaknya memfasilitasi pendaftar bidang prestasi keagamaan.

"Rencananya dibuka bersamaan dengan hari jadi Sidoarjo pada 31 Januari," katanya.

Karena itu, dia berharap calon pendaftar bisa mempersiapkan diri. Termasuk bagi para ustad dan guru-guru di Sidoarjo agar bisa mengidentifikasi anak didiknya yang prestasi. Nanti mereka bisa segera didaftarkan. "Pendaftaran dibuka selama dua bulan. Jadi, banyak waktu untuk persiapan meskipun pendaftaran nantinya sudah dibuka," jelasnya. (uzi/c6/any)

**Jawa Pos**



DITE SURENDRA/JAWA POS

**FINISHING:**  
Pekerja menyelesaikan pembangunan SMPN 2 Tulangan kemarin. Proyek tersebut mestinya selesai akhir tahun lalu.

## Sama-Sama Masuk Tahap Finishing

### Pembangunan Lanjutan SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon

**SIDOARJO** - Pembangunan lanjutan SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon sampai saat ini belum selesai meski sudah ada penambahan waktu. Mestinya, keduanya tuntas pada akhir tahun lalu. Saat ini kedua proyek masuk tahap *finishing*.

Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, Sarana, dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Heri Purwanto mengatakan, pembangunan SMPN 2 Tulangan saat ini tinggal 2 persen lagi. Di lokasi

pun, bangunan sekolah sudah tampak berdiri kokoh. "Seluruh struktur bangunan sudah tuntas, tinggal pengecatan sedikit," katanya. Pemasangan genting, atap, pintu, dan jendela juga sudah dilakukan.

Heri menyatakan, proyek-sinya pembangunan SMPN 2 Tulangan itu tuntas dalam dua sampai tiga hari ke depan. "Tepat akhir Januari ini proyek-sinya sudah tuntas," katanya. Selain menuntaskan sedikit pengecatan, saat ini para pekerja merapikan sisa material bangunan yang masih berada di lokasi. Juga pengecekan akhir sebelum nanti diserahkan ke dinas dikbud.

Tak jauh beda dengan SMPN 2 Tulangan, pembangunan SMPN 2 Prambon juga hampir

tuntas. Namun, proyek-sinya belum tuntas di akhir Januari ini. "Kekurangannya sedikit lebih banyak dibandingkan yang di SMPN 2 Tulangan," kata Heri. "Penuntasan pengecatan sama merapikan-merapikan saja. Namun, secara konstruksi sudah selesai semuanya," katanya. Proyek-sinya, awal Februari nanti sekolah itu tuntas terbangun.

Heri menyatakan, proyek tersebut mengalami keterlambatan dari target. Seharusnya tuntas akhir tahun lalu. Alhasil, pelaksana dikenai sanksi denda. "Pelaksana diberi waktu untuk menyelesaikan maksimal 50 hari dari target," katanya. Artinya, pertengahan Februari nanti maksimal harus tuntas. (uzi/c6/any)

# MUI: ASN

## Tidak Berhak Terima Zakat

### Bantah Pernyataan Sekjen Kemendagri

**JOGJAKARTA** - Pernyataan kontroversial disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro. Dia menyebut, sekitar 400 ribu aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam kategori miskin sehingga berhak mendapat zakat.

Sontak saja, pernyataan tersebut langsung dibantah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bagi MUI, personel ASN memiliki penghasilan minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Karena itu, mereka tidak masuk kategori miskin dan berhak menerima dana zakat (mustahik).

Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat M. Cholil Nafis mengatakan, secara umum orang yang berhak menerima zakat adalah orang miskin.

"Miskin itu adalah orang yang penghasilannya kurang dari kebutuhannya," katanya di sela menghadiri Halaqah Harlah Ke-101 NU di Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Jogjakarta, kemarin (29/1).

Cholil mengatakan, ASN di level terendah sekalipun sudah berpenghasilan di atas UMK. Menurut dia, ketika nominal UMK itu sudah ditetapkan, artinya sudah mencukupi kebutuhan seseorang. Dia menegaskan, miskin itu ketika kebutuhan lebih banyak ketimbang pendapatan. Bukan daftar keinginan.

"Makanya kalau Rp 7 juta, di tempat saya di Madura sudah lebih sekali," katanya. Tetapi, nominal gaji Rp 7 juta untuk ASN di Jakarta tidak miskin, namun pas-pasan. Jadi, bukan berarti ASN yang gajinya Rp 7 juta masuk golongan yang boleh menerima zakat. Di sisi lain, ASN dengan gaji sebesar itu belum masuk dalam kelompok yang wajib membayar zakat. (**wan/far/c6/oni**)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Pasca OTT KPK, Pelayanan Perpajakan di BPPD Sidoarjo Berjalan Normal

**Sidoarjo, Bhirawa**

Pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), yang menjerat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, AS dan anak buahnya SK, pelayanan di BPPD Sidoarjo pada, Senin (29/1), berjalan dengan normal.

Pada pagi harinya, Pj Sekda Sidoarjo Andjar Soerjadianto, bersama dengan Asisten I Ainur Rahman, Asisten III dr Atok Irawan dan Kepala BKD M. Mahmud, da-

tang saat apel pagi dan memberi semangat kepada pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Andjar menjadi pemimpin apel pagi di BPPD Sidoarjo itu. Pegawai mendapat pesan, pelayanan di OPD tersebut jangan sampai terhenti. "Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terhenti. Itu akan lebih parah," ujar Mahmud, usai memantau perkembangan pelayanan di BPPD Sidoarjo.

▶▶ ke halaman 11



## Pasca OTT KPK, Pelayanan Perpajakan di BPPD Sidoarjo Berjalan Normal

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalan dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

● Sambungan hal 1

Kehadiran Pj Sekda, Asisten dan BKD, kata Mahmud, juga untuk memastikan pelayanan di BPPD bisa lancar, tidak sampai kekurangan SDM maupun peralatan kerja. "Kalau kurang akan kita support," ujarnya.

Meski saat ini ruangan pegawai BPPD Sidoarjo masih disegel KPK, Mahmud memastikan pelayanan di dalam kantor BPPD tidak akan terhenti. "Ruangan kerja disegel, tidak kerja, tidak boleh, harus tetap bekerja," katanya.

Solusinya, mengalihkan pegawai ke sejumlah ruangan di BPPD Sidoarjo yang tidak disegel oleh KPK. Mereka terpantau tetap bisa bekerja, karena mereka melakukan pekerjaan dengan membuka aplikasi. "Kelancaran kerja dari para pegawai yang ada di dalam ini, mempengaruhi kelancaran pelayanan yang ada di front office," kata Mahmud.

Sebagaimana diketahui, OTT KPK ini selain 2 ASN di BPPD Sidoarjo, juga menangkap seorang pejabat lagi, di lingkungan Setda Pemkab Sidoarjo, berinisial AG.

Menanggapi OTT KPK ini, Gus Muhdlor-sapaan akrab Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, menyatakan akan sepenuhnya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

Karena kinerja KPK dianggap memang profesional dan transparan. Maka dari itu, dirinya akan mendukung sepenuhnya kelancaran proses penyidikan perkara OTT oleh KPK di BPPD Sidoarjo itu. Menurutnya, Pemkab Sidoarjo memang mendukung upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi.

Dalam akun Youtube KPK RI, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya mengatakan, OTT di kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo tersebut terkait adanya dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi.

Informasinya, hingga saat ini ada 10 orang telah

diperiksa. Tiga orang ASN Sidoarjo yang terjaring OTT KPK itu sudah dilayar ke gedung Merah Putih di jalan Kuningan Persada No Kav 4 Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk terus menjalani sejumlah penyidikan. [kus.iib]



Masyarakat yang sedang antri pelayanan, di dalam ruangan pelayanan Kantor BPPD Sidoarjo, Senin (29/1). alikusyanto/bhirawa



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## KILAS DEMOKRASI

### Relawan AMIN Sidoarjo Masif Serukan Suara Perubahan

#### Sidoarjo, Bhirawa

Relawan serta simpatisan untuk memenangkan Capres-Cawapres pasangan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Kabupaten Sidoarjo semakin masif dilakukan dengan menyerukan suara perubahan.

Relawan tersebut berkeliling desa sambil bermain musik patrol di 11 desa di daerah Kecamatan Porong, Sidoarjo dengan naik mobil, ratusan motor, kentongan beserta alat peraga kampanye (APK).

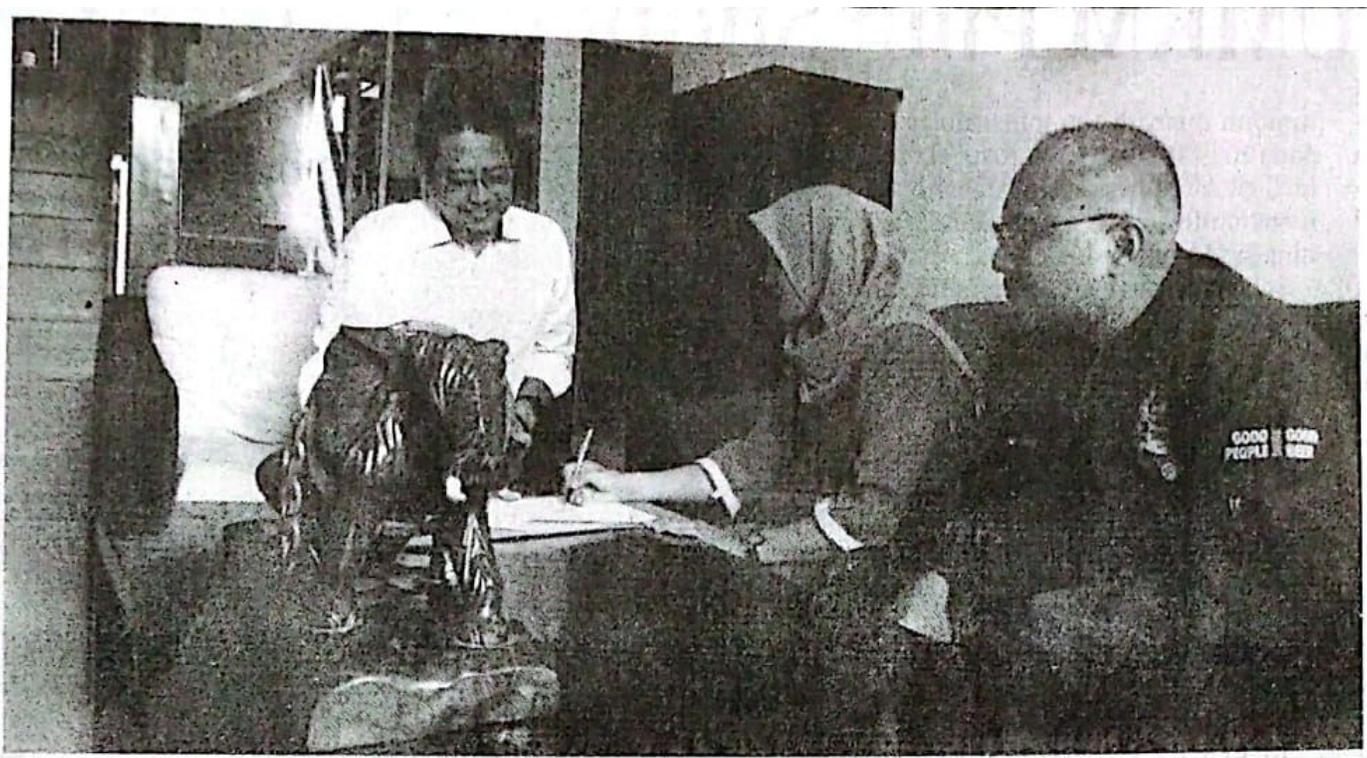
Kordinator Patrol Desa relawan AMIN di Sidoarjo Machmudatul Fatchiyah, Senin (29/1/2024) mengatakan peserta patrol desa juga membagi-bagikan kaos serta stiker kepada warga dan pengguna jalan lain sambil berpesan agar tidak lupa di tanggal 14 Februari 2024 mendatang mencoblos AMIN dan caleg dari PKB.

“Jangan lupa coblos caleg PKB ya bu, dan capresnya jangan lupa nomor 1 AMIN,” katanya.

Suasana semakin terasa ketika kentongan dan teriakan AMIN perubahan nyaring dinyanyikan seakan-akan kemenangan sudah di depan mata, mereka semangat mengajak warga untuk satu suara menyongsong perubahan demi Indonesia yang lebih baik.

“Ini kami bergerak untuk PKB dan AMIN. Semuanya semangat berjuang untuk perubahan,” ujar Muda, sapaan akrabnya. [ant.dre]

HARIAN  
**Bhirawa**  
Wala' Allahu Bihima Yawakid



LOETFU/DUTA

Penasehat hukum Radian Pranata Dwi Permana, dan Riadi Pamungkas dan klien (ER) saat penanda tangan kuasa.

# 15 Tahun Kerja, Terima Surat PHK Tanpa Kejelasan

**SIDOARJO** - Kembali dijumpai di lapangan, permasalahan gaji dan pesangon yang rawan sengketa dikeluhkan salah satu karyawan atau tepatnya mantan karyawan di salah satu perusahaan di bidang ekspedisi. ER mantan karyawan perusahaan di bidang jasa angkutan (ekspedisi) yang berkantor cabang di beberapa daerah di Sidoarjo dan berkantor pusat di Jakarta angkat bicara terkait status kepegawaian yang menggantung dan tidak jelas atas hak pesangonnya.

Penasihat Hukum Radian Pranata Dwi Permana mengatakan permasalahan klien kami terkait PHK dan pesangon serta gaji yang belum terbayarkan penuh. Tiga penasehat hukum dari kantor hukum Radian Pranata Dwi Permana, SH dan Partners yang berkantor di Perumahan Citra Garden Kabupaten Sidoarjo siap mengawal.

Diantaranya Riadi Pamungkas S.H., M.H, dan Radian Pranata Dwi Permana S.H., M.H serta Aryo Suro, S.H. Sesegera mungkin langkah awal kita berkirim surat Bipartit mas, karena surat kuasa sudah kita tanda tangani bersama.

“Terkait langkah awal kita, dalam Minggu ini kita berkirim surat Bipartit ke perusahaan mas,” terang Radian Pranata dibenarkan Riadi Pamungkas.

Terpisah Riadi Pamungkas menambahkan, sebelumnya penanda tangan surat kuasa atas permasalahan klien kami, karena sudah ada surat PHK, agar perusahaan untuk segera membayarkan yang menjadi hak-hak pekerja baik kekurangan upah dan pesangon sesuai uu cipta kerja dan PP no.35 th 2021,” terang Riadi

“Mengingat masa kerja dan loyalitas kepada perusahaan selama kurang lebih 15 tahun rela terima gaji terkatung-katung/dicicil bahkan ada yang belum terselesaikan menginjak bulan berikutnya,” begitu ungkap ER (37) warga Kedung Cangkring, kecamatan Jabon, kabupaten Sidoarjo tersebut kepada wartawan.

Masih lanjut ER lebih jauh menjelaskan, hal itu terjadi kurang lebih sejak 2 tahun terakhir terhitung bulan Mei 2022 hingga 26 November 2023 ada surat dari perusahaan bahwa per 14 Desember dinonaktifkan (PHK) dikarenakan perusahaan merugi, Namun saya tolak.

Namun, hal yang dirasa ganjal adalah bukti merugi tidak diketahui buktinya namun bisa menerima akan tetapi pesangon atau Hak yang akan diterima harus dicicil selama 2 tahun membuatnya meminta bantuan lembaga hukum/advokat untuk memenuhi haknya melalui penasehat hukum (PH).

Dari permasalahan tersebut ER menyampaikan tidak mau di kalah-kalahkan atau pun menang sendiri, karena pesangon oleh perusahaan maunya di Cicil dalam kurun waktu 2 tahun, itu berasa tidak pas bagi saya hingga meminta pendapat pada ahli hukum untuk memberikan wawasan dan menyerahkan permasalahan ini ke penasehat hukum. Masalah ini saya tak lain hanya menuntut hak saya yang harus dibayarkan secara penuh dan sesuai undang-undang yang berlaku, mengingat sudah cukup lama bekerja di Perusahaan tersebut..

“Semoga dengan adanya bantuan hukum melalui kuasa hukum saya, hak pesangon dan sisa gaji yang belum terbayarkan akan dapat segera terselesaikan dan segera terbayarkan secara lunas,” pungkask ER. ● Loe

### Program UHC Bagi Masyarakat

# Pemkab Cover BPJS Kesehatan 153.229 Ribu Jiwa

**SIDOARJO** - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali mengaktifkan program Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 ini. Pemkab Sidoarjo akan mencover BPJS Kesehatan gratis kepada 153.229 ribu jiwa warga Sidoarjo. Awal Januari ini jaminan kesehatan itu mulai dapat dimanfaatkan oleh warga Sidoarjo.

Pagi tadi, Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Sidoarjo di launching di Pendopo Delta Wibawa, Senin, (29/1/24). Asdep Bidang Kebersertaan dan Mutu Pelayanan Kedepu-tian Wilayah VII BPJS Kesehatan Jatim Aryo Pambudi didampingi Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita serta Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman hadir dalam kesempatan itu.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo M. Ainur Rahman mewakili Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP dalam sambutannya melau-ncing UHC mengatakan diaktifkannya kembali UHC menjadi bukti komitmen Pemkab Sidoarjo terhadap perlindungan kesehatan masyarakat Sidoarjo. Disampaikannya kebijakan itu menjadi salah satu dari 17



Pemkab Sidoarjo launching Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Senin, (29/1/24)

program prioritas bupati dan wakil bupati Sidoarjo.

"Ini merupakan bentuk komitmen yang kuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bagaimana program UHC ini sebuah bentuk kebijakan untuk melindungi kesehatan seluruh warga Sidoarjo," ucapnya.

M. Ainur juga mengatakan di-launchingnya kembali UHC menjadi bentuk komitmen Pemkab Sido-

arjo dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada warga Sidoarjo. Oleh karenanya diharapkan kebijakan UHC tersebut akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Dengan UHC ini diharapkan tingkat pelayanan kesehatan dan tingkat kesehatan masyarakat Sidoarjo semakin tinggi," ujarnya.

M. Ainur juga mengatakan kes-

ehatan menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kesehatan juga menjadi tolak ukur Indeks Pembangunan Manusia sebuah wilayah. Oleh karenanya peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat harus terus dijaga.

"Pasca launching ini bukan berarti akhir dari segalanya, namun ini awal dari proses panjang kita bagaimana menjaga komitmen dan meningkatkan layanan kesehatan yang harus kita berikan kepada masyarakat," ujarnya.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita mengatakan 153.229 ribu jiwa warga Sidoarjo yang tercover BPJS Kesehatan gratis itu masuk dalam segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBBU) dan bukan pekerja pemerintah daerah. Mereka mendapatkan hak rawat kelas tiga di rumah sakit yang menerima pasien BPJS Kesehatan. Terdapat 25 rumah sakit di Sidoarjo yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada semester satu tahun 2023 sejumlah 1.982.938 jiwa dengan peserta aktifnya sebanyak 1.500.935 jiwa sehingga

untuk jumlah prosentasi peserta aktif pada saat ini adalah 75,69 persen," ungkapnya.

Sementara itu Asdep Bidang Kebersertaan dan Mutu Pelayanan Kedepu-tian Wilayah VII BPJS Kesehatan Jatim Aryo Pambudi mengapresiasi capaian UHC yang dilakukan Pemkab Sidoarjo. Dikatakannya cakupan 75 persen peserta aktif BPJS Kesehatan warga Sidoarjo menjadikan Kabupaten Sidoarjo berstatus UHC privilege non cut off.

"Yang dimaksud non cut off itu masyarakat yang memiliki KTP Sidoarjo dapat didaftarkan melalui mekanisme yang dilakukan Dinas Sosial dan kebersertaannya bisa langsung aktif tanpa harus melewati masa tunggu," ucapnya.

Aryo Pambudi berharap status UHC Kabupaten Sidoarjo dapat terus terjaga. Dengan begitu pelayanan kesehatan masyarakat Sidoarjo dapat terjaga.

"Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak bupati beserta bapak wakil bupati, ketua DPRD, kepala OPD, camat, kepala desa dan seluruh pihak yang sudah berkomitmen bekerja keras sehingga Kabupaten Sidoarjo mencapai UHC," ucapnya. ● Loe

## DUTA



Penyerahan simbolis kartu BPJS gratis program UHC, Senin (29/1).

# Pemkab Sidoarjo Aktifkan Lagi Program UHC

**Sidoarjo - HARIAN BANGSA**  
Pemkab Sidoarjo kembali mengaktifkan program Universal Health Coverage (UHC), tahun 2024. Pemkab akan meng-gratiskan BPJS Kesehatan bagi 153.229 jiwa warga Sidoarjo.

Program UHC Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Sidoarjo ini dilau-ncing, di Pendopo Delta Wibawa, Senin (29/1). Hadir di acara ini diantara-

nya; Asdep Bidang Kebersertaan dan Mutu Pelayanan Kedepu-tian Wilayah VII BPJS Kesehatan Jatim Aryo Pambudi.

Asisten I Sekda Sidoarjo M. Ainur Rahman mengatakan, diaktifkannya kembali UHC menjadi bukti komitmen Pemkab terhadap perlindungan kesehatan masyarakat Sidoarjo. "Kebijakan ini salah satu dari 17 program prioritas Bupati

dan Wakil Bupati Sidoarjo," cetus Ainur.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita mengatakan 153.229 ribu jiwa warga Sidoarjo yang tercover BPJS Kesehatan gratis itu, masuk dalam segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBBU) dan bukan pekerja pemerintah daerah.

Mereka mendapatkan hak

rawat kelas tiga di rumah sakit yang menerima pasien BPJS Kesehatan. Terdapat 25 rumah sakit di Sidoarjo yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada semester satu tahun 2023 sejumlah 1.982.938 jiwa dengan peserta aktifnya sebanyak 1.500.935 jiwa sehingga untuk jumlah prosentasi peserta aktif pada saat ini adalah 75,69

persen," ungkapnya.

Asdep Bidang Kebersertaan dan Mutu Pelayanan Kedepu-tian Wilayah VII BPJS Kesehatan Jatim Aryo Pambudi mengapresiasi capaian UHC yang dilakukan Pemkab Sidoarjo.

Dikatakan, cakupan 75 persen peserta aktif BPJS Kesehatan warga Sidoarjo menjadikan Kabupaten Sidoarjo berstatus UHC privilege non cut off. (sta/rus)

## Relawan AMIN Masif Dengungkan Perubahan

**SIDOARJO, SURYA** - Gerakan patrol desa terus dilakukan relawan serta simpatisan untuk memenangkan Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Terbaru, relawan AMIN Sidoarjo melakukan hal serupa.

Mereka kompak patrol di 11 desa di daerah Kecamatan Porong, membawa mobil, ratusan motor, kentongan beserta alat peraga kampanye (APK). Peserta patrol desa juga membagi-bagikan kaos serta stiker kepada warga dan pengguna jalan lain.

"Jangan lupa coblos caleg PKB ya bu, dan capres cawapresnya jangan lupa nomor 1 AMIN," kata salah satu peserta patrol saat membagikan kaos. Senin (29/1).

Kordinator Patrol Desa Machmudatul Fatchiyah mengatakan, patrol desa ini dilakukannya semata-mata ingin menarik suara pemilih mencoblos PKB dan AMIN di bilik suara. "Ini kami bergerak untuk PKB dan AMIN. Semuanya semangat berjuang untuk perubahan," kata Muda sapaan akrabnya.

Muda juga mengatakan,



SURYA/ISTIMEWA

**SUARA PERUBAHAN** - Relawan AMIN Sidoarjo ajak masyarakat satu suara perubahan.

kegiatan serupa akan terus dilakukannya sampai hari tenang tiba, semuanya demi mempertebal kemenangan PKB dan AMIN di Sidoarjo. "Kampanye kreatif akan terus kami lakukan hingga menjelang pencoblosan. Kami mengajak keluarga, sanak saudara untuk memilih AMIN dan PKB," ujarnya.

Terpisah, Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jatim mengklaim dukungan kelompok relawan di masih solid. Tak hanya berperan mendulang dukungan untuk paslon nomor 03, relawan bersama tim pemenangan juga komitmen mengawal

suara di TPS.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Direktorat Relawan TPD Ganjar-Mahfud Jawa Timur, Daniel Rohi hasil konsolidasi keliling menemui kelompok relawan. Terbaru, Direktorat Relawan TPD Ganjar-Mahfud Jatim menemui para relawan wilayah Kediri Raya atau eks Keresidenan Kediri, Sabtu (27/1) lalu.

"Relawan solid dan militan dengan jumlah kekuatan sebanyak 1046 organ relawan yang tercatat dan berkordinasi, tersebar di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur," kata. (ffs/yus)

## Kejari Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

KOTA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menandatangani pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal tersebut ditandai dengan pelepasan burung dara di halaman Kejari Sidoarjo, Senin (29/1).

Dalam hal penegakan hukum, Kejari Sidoarjo harus siap dan tulus dalam menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah mengatakan, adanya pencanangan ZI menuju WBK/WBBM demi perubahan yang lebih baik.

"Perubahan tersebut menyangkut kinerja pelayanan terhadap publik, tata kelola, yang terpenting mencegah adanya tindakan korupsi," bebarnya.

Menurut Roy, dalam pencanangan ZI nantinya ada reward dan punishment khusus pegawai yang mempunyai prestasi. "Pegawai berprestasi pasti akan diberikan reward," ungkapnya.

Sementara untuk pegawai disiplin akan diberikan punishment sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, selama tahun 2023 ada sembilan



KOMITMEN: Pri Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto tandatangi plagam pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan Kajari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Kejari Canangkan...

kasus yang terselesaikan dari 12 kasus khusus korupsi.

“Ada pengembalian uang negara sebesar Rp 1,8 miliar. Dan itu

capaian yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Dalam penyelesaian kasus tersebut Kejari Sidoarjo berhasil meraih predikat prestasi juara II di seluruh Indonesia. (dik/vga)



## Pertahankan Predikat UHC, Peserta Capai 1.9 Juta Jiwa

KOTA-Tahun 2023 Sidoarjo berhasil mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan peserta paling banyak, yakni 1.982.983 jiwa.

Hal tersebut berdasarkan publikasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Terdapat 75,69 persen peserta atau 1.500.935 jiwa yang aktif dalam program tersebut.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohamad Ainur Rohman mengatakan, UHC adalah komitmen dari Pemkab dan DPRD dalam melindungi masyarakat Sidoarjo. Karenanya pihaknya mendorong agar pelayanan dan jaminan kesehatan yang terbaik

● Ke Halaman 10



PELAYANAN: Launching UHC program JKN bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa, Senin (29/1).

M SAIFUL FORNIAVITARI SIDOARJO



### Pertahankan Predikat UHC,...

diberikan kepada masyarakat.

"Ini merupakan bentuk komitmen yang kuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bagaimana program UHC ini sebuah bentuk kebijakan untuk melindungi kesehatan seluruh warga Sidoarjo," ucapnya saat launching UHC Program JKN Bagi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa, Senin (29/1).

Ainur menyebut bahwa UHC menjadi momentum untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Sidoarjo. Sebab ia yakin bila kesehatan tersebut naik maka produktivitas masyarakat akan ikut tumbuh.

Baginya, yang paling penting saat ini adalah bagaimana Sidoarjo dapat

mempertahankan kepesertaan aktifnya. Sebagaimana regulasi yang minimal harus melampaui 75 persen.

"Ini merupakan perjuangan panjang kita semua dan yang tersulit untuk saat ini adalah mempertahankannya, akan tetapi yang paling penting masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Yessy Novita

mengatakan, hingga saat ini Kabupaten Sidoarjo masih di posisi UHC.

Sehingga bagi masyarakat yang ber-KTP Sidoarjo akan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.

"Sehingga warga masyarakat Sidoarjo yang memerlukan layanan kesehatan dan belum terdaftar sebagai peserta JKN bisa langsung aktif tanpa harus menunggu masa tunggu," katanya. (sai/vga)



TERHARU: Calon jamaah haji yang berangkat tahun lalu.

## 90 Persen Jamaah Haji Selesaikan Pengurusan Paspapor

KOTA-Menjelang musim haji tahun 2024, 90 persen Calon Jamaah Haji (CJH) Sidoarjo sudah menyelesaikan pengurusan paspor. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (P/JU) Kemenag Sidoarjo Khoidar menyampaikan,

kuota jamaah haji 2024 mencapai 213.320 jemaah. Sidoarjo mendapatkan porsi sebanyak 2.526 jemaah.

Pembagian kuota tersebut terdiri dari 2.478 jemaah haji reguler, 48 jemaah haji lansia, dan 832 jemaah haji

cadangan.

Kuota tambahan dan JCH cadangan ini, kata dia, juga sudah diminta untuk membuat paspor. Kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap satu dan dua serta

● Ke Halaman 10



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## 90 Persen Jamaah Haji...

melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau bipih.

Khoidar optimistis bahwa proses pengurusan paspor bakal segera tuntas.

"Tinggal 10 persen saja, semoga bisa tuntas dengan lancar," katanya.

Di sisi lain, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dimulai sejak 9 Januari masih berlangsung hingga 12 Februari mendatang.

Meskipun belum dapat memastikan jumlah jemaah haji Sidoarjo yang telah melakukan pelunasan, Khoidar berharap banyak yang telah melaksanakan kewajiban tersebut. (nis/vga)



# Aktifkan Program UHC, Pemkab Sidoarjo akan Mencover BPJS Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat

☆☆☆☆☆

Redaksi 🕒 Januari 29, 2024

🗨️ 0



Jawapes, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali mengaktifkan program Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 ini. Pemkab Sidoarjo akan mencover BPJS Kesehatan gratis kepada 153.229 ribu jiwa warga Sidoarjo. Awal Januari ini jaminan kesehatan itu mulai dapat dimanfaatkan oleh warga Sidoarjo.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Pagi tadi, Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Sidoarjo di launching di Pendopo Delta Wibawa, Senin (29/1/2024). Asdep Bidang Kebersertaan dan Mutu Pelayanan Kedeputian Wilayah VII BPJS Kesehatan Jatim Aryo Pambudi didampingi Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita serta Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman hadir dalam kesempatan itu.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo M. Ainur Rahman mewakili Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor, S.IP dalam sambutannya melaunching UHC mengatakan diaktifkannya kembali UHC menjadi bukti komitmen Pemkab Sidoarjo terhadap perlindungan kesehatan masyarakat Sidoarjo. Disampaikannya kebijakan itu menjadi salah satu dari 17 program prioritas bupati dan wakil bupati Sidoarjo.

"Ini merupakan bentuk komitmen yang kuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bagaimana program UHC ini sebuah bentuk kebijakan untuk melindungi kesehatan seluruh warga Sidoarjo," ucapnya.

M. Ainur juga mengatakan diluncingnya kembali UHC menjadi bentuk komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada warga Sidoarjo. Oleh karenanya diharapkan kebijakan UHC tersebut akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Dengan UHC ini diharapkan tingkat pelayanan kesehatan dan tingkat kesehatan masyarakat Sidoarjo semakin tinggi," ujarnya.

M. Ainur juga mengatakan kesehatan menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kesehatan juga menjadi tolak ukur Indeks Pembangunan Manusia sebuah wilayah. Oleh karenanya peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat harus terus dijaga.

"Pasca launching ini bukan berarti akhir dari segalanya, namun ini awal dari proses panjang kita bagaimana menjaga komitmen dan meningkatkan layanan kesehatan yang harus kita berikan kepada masyarakat," ujarnya.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita mengatakan 153.229 ribu jiwa warga Sidoarjo yang tercover BPJS Kesehatan gratis itu masuk dalam segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBBU) dan bukan pekerja pemerintah daerah. Mereka mendapatkan hak rawat kelas tiga di rumah sakit yang menerima pasien BPJS Kesehatan. Terdapat 25 rumah sakit di Sidoarjo yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada semester satu tahun 2023 sejumlah 1.982.938 jiwa dengan peserta aktifnya sebanyak 1.500.935 jiwa sehingga untuk jumlah prosentasi peserta aktif pada saat ini adalah 75,69 persen," ungkapnya.

Sementara itu Asdep Bidang Kebersertaan dan Mutu Pelayanan Kedeputian Wilayah VII BPJS Kesehatan Jatim Aryo Pambudi mengapresiasi capaian UHC yang dilakukan Pemkab Sidoarjo. Dikatakannya cakupan 75 persen peserta aktif BPJS Kesehatan warga Sidoarjo menjadikan Kabupaten Sidoarjo berstatus UHC privilege non cut off.

"Yang dimaksud non cut off itu masyarakat yang memiliki KTP Sidoarjo dapat didaftarkan melalui mekanisme yang dilakukan Dinas Sosial dan kepesertaannya bisa langsung aktif tanpa harus melewati masa tunggu," ucapnya.

Aryo Pambudi berharap status UHC Kabupaten Sidoarjo dapat terus terjaga. Dengan begitu pelayanan kesehatan masyarakat Sidoarjo dapat terjaga.

"Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak bupati beserta bapak wakil bupati, ketua DPRD, kepala OPD, camat, kepala desa dan seluruh pihak yang sudah berkomitmen bekerja keras sehingga Kabupaten Sidoarjo mencapai UHC," ucapnya. (Tyas)